Globethics Repository



DEKONTRUKSI PARADIGMA PENDIDIKAN PESANTREN

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Preprint
Authors	Burhanuddin, Hamam
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-01 03:25:18
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/183891

DEKONTRUKSI PARADIGMA PENDIDIKAN PESANTREN

(Upaya Transformasi Sosial dan Kebangkitan Intelektualisme Islam)

Oleh :

Hamam Burhanuddin

(Staf Pengajar STITI Karya Pembangunan Paron_Ngawi)

CALL FOR PAPER GLOBETHICS.NET INDONESIA

2011

ABSTRACT

Pesantren is the original Indonesian product that until this experienced the quite fast development, was seen from this development pesantren could not be released from the history of the emergence in Indonesia, in the study of this scientific paper the writer wanted to give the new direction thinking about the pesantren that developed from period , at the same time tracing the historic root his emergence as well as geneologi the intellectual's thinking from the founders of Pesantren. Geneologi so that gave the special thinking feature for the development of the pesantren at this time.

In this study the writer used the historic approach and the critical analysis in studying the development of the pesantren, as well as progressive thinking critical more writers used in seeing pesantren efforts to respond to the development of the time that increasingly advanced, that was marked by the development of information technology as well as the globalization

Here needed the existence dekontruksi the pesantren paradigm, was caused by the existence of the demand of the world time of the pesantren it was demanded to harmony and combined between the traditional values of the pesantren and the modernity of the development of the time. With the pattern approach thought inklusifistik, egalitarian and the spirit to improve himself in translating the values of the traditional cultural compromise in a modern way, here the location of the typical character indegenousitas the pesantren as the Islam educational agency in Indonesia. Hoped for in front of the development- the world of the pesantren as the Islam educational agency eldest could open and maintain the discourse of the discourse of world civilisation in Indonesia in especially and Islam in the world.

Keyword: *Dekonstruksi, Pesantren paradigm*

DEKONTRUKSI PARADIGMA PENDIDIKAN PESANTREN

(Upaya Transformasi Sosial dan Kebangkitan Intelektualisme Islam)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Refleksi Historiografi Pesantren

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.(Dawam, 2004: 267). Dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman luar biasa dalam membina, mencerdaskan dan mengembangkan masyarakat disekelilingnya (Republika). Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik, tidak karena keberadaannya yang sudah lama, tetapi juga kultur, metode dan jaringan yang ditetapkan oleh lembaga agama tersebut. Karena keunikan tersebut, Clifford Geertz (1981) menyebutnya sebagai sub-kultur masyarakat Indonesia (khususnya Jawa) (Geertz, 1960).

Belum diketahui secara pasti pesantren yang pertama kali muncul sebagai pusat-pusat pendidikan agama di Indonesia. Yang paling lama berada diwilayah Jawa Timur pada abad 18, walaupun sebenarnya pesantren di Indonesia mulai bermunculan pada akhir abad ke-19. namun jika melihat beberapa hasil studi yang dilakukan beberapa sarjana seperti Dhofier (1870), Martin (1743) dan ilmuwan lainnya, ada indikasi bahwa munculnya pesantren tersebut diperkirakan sekitar abad ke-19. Akan tetapi terlepas dari persoalan tersebut ada *signifikansi* pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat muslim pada masa itu.

Menurut Nurcholish Madjid, secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna ke-Islaman, tetapi juga memuat makna keaslian Indonesia. Sebab cikal bakal lembaga yang dikenal pesantren dewasa ini sebenarnya sudah ada pada masa Hindu- Buddha, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan dan meng-Islamkan (Madjid, 1983: 3). Pesantren bukanlah sekedar merupakan

fenomena lokal ke-Jawaan (hanya terdapat di Jawa), akan tetapi merupakan fenomena yang juga terdapat diseluruh Nusantara. Ini berarti bahwa lembaga pendidikan sejenis pesantren ini dapat ditemukan pula diluar pulau Jawa. Di Aceh disebut dengan *dayah*, di Minangkabau ia dinamakan *surau*. Berbagai penelitian mengatakan bahwa awal abad ke-16 pesantren merupakan pusat lembaga pendidikan Islam kedua setelah masjid (Martin, 1995: 24).

Setelah berabad-abad lamanya, pesantren semakin berkembang dan jumlahnya mencapai ribuan. Menurut buku laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama pada tahun 1982, jumlah pesantren di Indonesia tercatat sebanyak 4.890 buah. Dalam rentang waktu selama 22 tahun kemudian (antara tahun 1982- 2004), jumlah pesantren semakin bertambah banyak sejalan dengan didirikannya pesantren-pesantren diberbagai pelosok tanah air, terutama pada masa orde reformasi sekarang ini (Ismail, 2004). *Indegenousitas* pesantren kontras berbeda dengan praktek pendidikan pada institusi pendidikan lainnya, sehingga dinamika sekaligus problematika yang muncul kemudian juga menampilkan watak yang khas dan eksotik.

Selama ini corak pesantren yang diidentikkan dengan kultur tradisionalisme, setidaknya harus dipahami dalam dua sisi yang berbeda. Disatu sisi tradisionalisme ini mengacu kepada satu sistem ajaran yang berakar dari perkawinan konspiratif antara teologi *skolatisisme* Asy'ariyah dengan Maturidiyah dengan ajaran-ajaran tasawuf (mistisisme Islam) yang telah lama berkembang di Indonesia (Wahid, 1987). Sementara disisi yang lain tradisionalisme dalam metodologi pengajaran (pendidikan) yang diterapkan dalam dunia pesantren (baca-*salafiyah*). Penyebutan tradisional dalam konteks pengajaran dikarenakan dalam hal ini pola pengajarannya yang monologis, bukan pada dialogis-emansipatoris. Hal ini dominasi dan peran kiai menjadi sangat dominant dalam mendoktrinasi para santri-santrinya dengan pendekatan pengajaran yang bersifat klasik seperti; *bandongan, sorogan, pasaran* dan lain sebagainya (Wahid, 1987). Oleh karena itu tradisionalisme dalam dunia pesantren tidak perlu ditinggalkan, hanya saja perlu disinergikan dengan perkembangan dan modernitas zaman. Hal ini berangkat dari keyakinan masih perlunya

keseimbangan antara keilmuan agama dan keilmuan umum serta yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan generasi-generasi yang mampu mengemban amanah sebagai seorang ulama-intelektual. Maka dari itu memadukan unsur-unsur tradisionalisme dan nilai-nilai modernitas dalam kehidupan pesantren menjadi suatu pilihan sejarah *(historical choice)* yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Diantara problem lain yang sering dijumpai dalam kehidupan pesantren adalah berkutat pada pola pendidikannya yang masih bercorak salaf, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang efektitas metodologi pengajaran dalam dunia pesantren. Disisi lain meredupnya nilai-nilai budaya yang berkembang akibat gencarnya pemberitaan miring tentang dunia pesantren, maka perlu adanya dialog peradaban-kultural antara pesantren dengan masyarakat. Hal ini menjadi *urgen* pada saat ini dimana seharusnya pesantren mampu menjembatani jurang-jurang kegagapan transformasi, baik itu sosial, ekonomi serta yang tidak boleh dilupakan dalam bidang pendidikan di masyarakat. Kesemuanya tidak lain adanya romantisme sejarah bahwa pesantren mampu menjadi tumpuan bangsa ini dalam mencetak kader-kader intelektual-ulama bagi bangsa Indonesia.

Disinilah perlu adanya *dekontruksi* paradigma pesantren, dikarenakan adanya tuntutan zaman dunia pesantren dituntut untuk mampu menyelaraskan dan mengombinasikan antara nilai-nilai tradisional pesantren dengan modernitas perkembangan zaman. Dengan pendekatan pola pikir *inklusifistik*, egaliter dan semangat untuk memperbaiki diri dalam menterjemahkan nilai-nilai *kompromi* kebudayaan tradisional dengan modern, disinilah letak karakter khas *indegenousitas* pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Diharapkan kedepan –pembangunan- dunia pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua mampu membuka dan mempertahankan wacana diskursus peradaban dunia di Indonesia pada khususnya dan dunia Islam pada umumnnya.

Sebagai lembaga pendidikan pesantren akan diminati anak-peserta didik-, orangtua dan masyarakat apabila ia mampu memenuhi kebutuhan mereka akan ilmu dan teknologi untuk menguasai suatu bidang kehidupan tertentu, kemampuan moral keagamaan dan moral sosial budaya (Mastuhu, 1994, 4-5).

Bertitik-tolak dari hal diatas maka modus-modus baru dicari sebagai langkah pemecahannya. Sebagaimana diketahui, dinamika sistem pendidikan pesantren adalah pergeseran, perubahan dan perkembangannya pesantren sesuai dengan perkembangan zaman. Kualitas dari sistem pendidikan pesantren tergantung pada kualitas kiai sebagai aktor sosial, mediator, dinamisator, katalisator, motivator maupun sebagai kekuatan sebuah pesantren dengan kedalaman ilmu dan wawasannya. Diharapkan nantinya pesantren mampu berperan dan mengantisipasi serta menjawab problematika masyarakat – keummatan- pada setiap aspek sesuai dengan bidang kebutuhan masyarakat (Ridwan, 2005 : 7). Pesantren mampu menjadi pusat peradaban muslim yang senantiasa mengajarkan dan menyuarakan *inklusifisme* nilai-nilai ajaran Islam sebagai *rahmatan lil-alamiin*.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Menggagas Format Idealisme Pendidikan Pesantren

Ada beberapa pendapat tentang asal-usul kata santri. Menurut A. H. Jhons, kata santri berasal dari bahasa tamil; yang berarti guru ngaji. C. C. Berg berpendapat bahwa kata santri berasal dari kata *shastri* yang berarti orang yang tahu dan memahami kitab suci agama Hindu. Jhons selanjutnya mengatakan bahwa kata *shastri* itu sendiri berasal dari kata sastra yang berarti buku-buku suci (buku-buku agama) atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan (Dofier, 1994: 18) Dari kata santri inilah terbentuklah kata pesantren seperti yang kita kenal sekarang ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), pesantren berarti ; asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya; pondok.

Jika kita mendengar kata pesantren, maka pesantren dipahami sebagai komunitas yang terdapat didalamnya ;

[1] Kiai, yang mengajar dan mendidik;

[2] Santri, yang belajar dari kiai ;

[3] Masjid, tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, shalat berjamaah dan
sebagainya ;

[4] Pondok/ asrama, tempat tinggal para santri, (Mukti, 1987: 16) atau selama ini dikenal dengan ciri khusus dan ciri umum.

Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, pesantren didukung oleh beberapa faktor sosio-kultural-keagamaan yang kondusif sehingga eksistensi pesantren semakin menguat dan berakar di masyarakat. Faktor- faktor yang menopang menguatnya keberadaan pesantren antara lain sebagai berikut :

1) Karena agama Islam berkembang dengan pesat maka masjid-masjid dan pesantren-pesantren banyak didirikan untuk dijadikan sarana pembinaan dan pengembangan syiar Islam.

2) Kedudukan dan kharisma kiai dan ulama sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan pesantren.
3) Adanya *migrasi* para ulama dari kota (pusat-pusat pemerintahan) untuk menghindari siasat yang dilakukan oleh para penjajah terdahulu, sehingga dalam perkembangannya mereka lebih fokus dan berkonsentrasi pada wilayah pedesaan.
4) Kebutuhan akan pendidikan Islam yang mampu menampung gairah keilmuan masyarakat Islam yang tidak didapati pada sekolah-sekolah umum, dalam kesejarahan tercatat adanya pembedaan kelas pada sekolah-sekolah Belanda berdasar pada strata sosial tertentu.
5) Adanya hubungan keilmuan dan keagamaan antara Indonesia dengan Mekkah sejak dahulu, yang akhirnya membuka *kran* pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia akibat interaksi yang sangat intens.

Dalam perjalanan sejarah pesantren dilihat dari segi pertumbuhan sarana dan prasarana pendukungnya mengalami dinamika perkembangan yang pada akhirnya berkembang pada kemampuan pesantren dalam menjawab tantangan zaman berupa; pengelolaan manajemen secara profesional, maka ada klasifikasi umum pesantren berupa pondok pesantren *salaf*, semi berkembang, berkembang dan pesantren *khalaf* (modern) (Ismail, 96-97).

Pondok pesantren yang ideal adalah pondok pesantren yang mampu mengantisipasi adanya pendapat yang mengatakan bahwa alumni pesantren tidak berkualitas. Oleh sebab itu maka fokus sasaran pembentukan mental para santri menjadi prioritas utama dengan mental membangun.

Adapun ciri-ciri mental membangun adalah :

1. Sikap terbuka, kritis, suka menyelidiki, bukan mentalitas mudah menerima tradisi, *takhayul* atau otoritas modern sekalipun, dismaping itu juga tidak anti-kritik.
2. Melihat ke depan *(visioner).*
3. Lebih sabar, teliti dan lebih tahan bekerja.
4. Mempunyai inisiatif dalam menggunakan metode baru.

5. Bersedia bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lebih modern, misalnya koperasi, perbankan dan lainnya.

Dengan memperbaharui mental ini, maka sudah tentu berakibat pada pembaharuan kurikulum pondok pesantren. Karena sampai saat ini, sebagian sistem pendidikan dan pengajaran pesantren lebih banyak ditekankan kepada agama, mental dan intelektual. Pendidikan *vokasional*, atau pendidikan yang bersentuhan dengan menumbuh-kembangkan kemampuan bakat dan keterampilan di lingkungan pesantren belum mendapat tempat yang layak. Oleh karena itu perlu adanya pelajaran-pelajaran yang bisa menumbuh-kembangkan bakat dan minat peserta didik (santriwan/santriwati), sehingga nantinya bisa diharapkan dari pesantren lahir individu intelektual-ulama, juga para wira-usahawan yang siap dan mampu bersaing dalam dunia usaha dan tenaga kerja. Dikotomi pengetahuan ini selama tumbuh subur dan berkembang dalam dunia pesantren –terutama yang bercorak *salafiyah*- yaitu pembedaan kelas antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu Islam. Selama ini dalamkhazanah dunia intelektual Islam sering dijangkiti oleh virus "stigma ilmu umum dari Barat yang sekuler", sehingga pada akhirnya kecenderungan *(milieu)* untuk mempelajari ilmu-ilmu umum menjadi melemah dikalangan umat Islam. Padahal kesetaraan dalam perlakuan kedua ilmu tersebut sudah tentu akan mendatangkan studi *komparatif* (perbandingan) yang positif bagi kedua belah pihak, yakni ilmu umum –yang diyakini berasal- dari dunia Barat dan ilmu-ilmu keislaman yang datang dari Dunia Timur (Islam) bisa saling mengisi dan melengkapi.

Perpaduan antara ilmu –ilmu keislaman *(Islamic sciences)* dengan ilmu-ilmu umum *(modern sciences)* dinamakan dengan pendekatan ***integrative-interkonektif*** yang mencakup tiga dimensi pengembangan ilmu, yakni *hadlarah al-nas, hadlarah al-'ilm* dan *hadlarah al-falsafah* yang bertujuan untuk menghadirkan sebuah kesatuan imu yang *intergratif* dan *interkonektif* (TIM CDST UIN, 2005: 29).

Akibat dari mengesampingkan keterampilan kerja –pendidikan *vokasional*- dan hanya mengutamakan pendidikan dan pengajaran mental dan intelektual, maka pendidikan menimbulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menimbulkan intelektualisme, membanggakan kecerdasan intelektual, kurang menghargai kerja tangan yang dianggap sebagai kerja kasar karena mengotori tangan.
2. Menimbulkan *priyayi-isme* yakni keinginan untuk menjadi pegawai dan enggan bekerja sendiri.
3. Terlalu mementingkan ijazah, sehingga kadang-kadang berusaha untuk memperoleh ijazah dengan jalan yang tidak wajar.
4. Dan untuk menjadi "pegawai negeri", sehingga madrasah dalam pondok pesantren minta dilegalisasi-*diakui*- dan disamakan atau "dinegerikan". Ini adalah semangat *"etatisme",* suatu anggapan bahwa segala sesuatu itu harus diatur oleh pemerintah, termasuk juga bidang pendidikan (Nasir, 8-9).

Pendidikan pondok pesantren yang merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional –setidaknya- memiliki 3 unsur utama yaitu:

1) Kiai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri;
2) Kurikulum pondok pesantren; dan
3) Sarana peribadatan dan pendidikan, seperti masjid, rumah kiai, dan pondok, serta sebagian madrasah dan bengkel-bengkel kerja keterampilan.

Kegiatan pesantren berorientasi pada nilai yang terkandung dalam "**Tri Dharma Pondok Pesantren"** yaitu:

1) keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
2) pengembangan keilmuan yang bermanfaat; dan
3) pengabdian kepada agama, masyarakat dan negara.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren sebenarnya memiliki tempat yang istimewa. Namun, kenyataan ini belum disadari oleh mayoritas masyarakat muslim, hal ini dikarenakan kelahiran undang-undang ini masih amat belia dan belum sebanding dengan usia perkembangan pesantren di Indonesia. Keistimewaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat kita lihat dari

ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-udang Sisdiknas sebagai berikut:

Dalam Pasal 3 UU Sistim Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di pesantren. Dalam perjalanan sejarah pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia. Tidak hanya itu, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didirikan atas peran serta masyarakat, telah mendapatkan legitimasi dalam undang-undang Sisdiknas.

Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat pada Pasal 8 menegaskan bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini berarti menjamin eksistensi dan keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan diakomodir dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 15 tentang jenis pendidikan yang menyatakan bahwa Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, *vokasi*, keagamaan, dan khusus. Pesantren adalah salah satu jenis pendidikan yang memang selama ini *concern* di bidang keagamaan.

Keberadaan pesantren sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam pendidikan juga mendapat penguatan dari UU Sisdiknas. Pasal 54 menjelaskan: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan

pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Bahkan, pesantren yang merupakan Pendidikan Berbasis Masyarakat diakui keberadaannya dan dijamin pendanaannya oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Pasal 55 menegaskan:

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Omar Hamalik (1990:56) mengungkapkan perlunya pemikiran-pemikiran yang inovatif dalam aspek kurikulum. mengingat masyarakat yang selalu berubah maka kurikulum pun akan selalu berubah. Berdasarkan pemahamannya, kurikulum dapat dipandang sebagai kurikulum tradisional dan kurikulum secara modern (Abdullah, 1999: 4). Karena pesantren mampu eksis hingga saat ini maka pesantren tentu memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri dalam mengolah kurikulum tersebut. Untuk semakin memajukan pendidikan pesantren sesuai amanat UU No. No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, eksistensi dan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan harus makin ditingkatkan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penanggungjawab pendidikan harus bersungguh-sungguh memberikan ruang dan peran yang lebih luas untuk merevetalisasi dan membangun modernisasi dunia pesantren.

B. Diskursus Pesantren, Kiai dan Transformasi Sosial

Kedudukan para kiai dipesantren-pesantren bukanlah sekedar memberikan pelajaran, pembimbing keagamaan bagi santri-santrinya akan tetapi juga berperan sebagai tokoh non-formal yang ucapan-ucapan pesantren. Pendek kata para kiai berperan sebagai sosok, model atau contoh yang baik *(uswatun hasanah)* tidak saja bagi santri, akan tetapi juga bagi seluruh komunitas disekitar pesantren mereka.

Sosiolog Clifford Geertz mengemukakan bahwa kiai selain berperan sebagai tokoh masyarakat yang memberikan pelayanan sosial, mereka juga berperan sebagai mediator atas arus informasi yang masuk ke lingkungan santri. Para kiai inilah yang mentransformasikan nilai-nilai yang mereka anggap baik dan berguna kepada santri dan komunitas dilingkungan mereka dan menolak atau membuang nilai-nilai yang dianggap kurang/tidak baik bagi mereka (Ismail : 99). Peran ini akan macet, manakala arus informasi yang demikian keras masuk kedalam kehidupan masyarakat dan posisi kiai tidak dapat lagi membendung arus budaya atau informasi yang masuk. Dari kemacetan fungsional peran kiai timbul adanya kesenjangan budaya *(cultural lag)* antara kiai dengan komunitas masyarakatnya, dan tidak jarang kiai ditinggalkan oleh penganutnya atau santrinya (Wahid, xvi-vii).

Tulisan Horikhosi (1987) tentang kiai dan perubahan sosial melalui apa yang disebutnya peran mediator. Kiai dapat menjadi penghubung diantara kepentingan atasan dan bawahan, karena kiai memiliki kemampuan untuk memahami dunia kaum bawahan dan dunia kaum atasan. Kiai teryata memiliki kemampuan individual untuk melakukan perubahan sosial terhadap pandangan hidup tradisional kearah pandangan hidup modern dengan watak emansipatoris. Kiai dengan kharismanya teryata dapat menjadi mediator ditengah kesulitan yang dihadapi masyarakat kala itu (Syam, 2005: 28).

Hiroko Hiroshi mencoba merevisi tesis yang dikemukakan oleh Geertz diatas. Berdasarkan penelitiannya dibeberapa pesantren di Indonesia. Hiroko mengajukan tesis barunya sebagai berikut :

1. Para kiai tidak bersikap meredam terhadap perubahan yang terjadi , akan tetapi mereka justeru mempelopori perubahan sosial dengan cara mereka sendiri.
2. Para kiai bukan melakukan penyaringan informasi, melainkan menawarkan agenda perubahan yang mereka anggap sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang mereka pimpin.
3. Para kiai bukannya kurang berperan (karena menunda datangnya perubahan melalui proses penyaringan informasi), akan tetapi mereka berperan sepenuhnya karena mereka mengerti bahwa perubahan sosial merupakan perkembangan yang tak terelakkan. (Horikoshi, 1986).

Jadi dalam hal ini bisa dipahami figur –seorang- kiai menentukan hitam-putihnya lembaga pendidikan Islam/pesantren yang ia pimpin. Kiai berperan aktif dalam mewujudkan tatanan baru yang dapat dijadikan pijakan hidup dan kehidupan masyarakat pada zaman modern ini tanpa dengan meninggalkan ciri khas/karakteristik Islam sebagai sebuah pedoman hidup dan kehidupan. Dengan kata lain perubahan yang terjadi di lingkungan pesantren tidak bisa dilepaskan begitu saja dari adanya keterkaitan dan peran-serta kiai didalamnya.

Perubahan yang terjadi pada ranah sosial diakui atau tidak –bisa-menimbulkan dampak yang tidak kecil di masyarakat. Noeng Muhajir mengelompokkan dinamika perubahan sosial menjadi dua kelompok, yaitu :

[1] Dinamika dalam arti instrumentasi dan;

[2] Dinamika adalam arti tujuan (Muhajir, 1984" 11-12).

Dari dua analisa dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan bisa terjadi dengan evolusioner dan dalam perubahan tersebut ada suatu kekuatan *(power)* yang menjadikan sesuatu itu dapat berubah. Sedangkan faktor pendorong yang mempercepat perubahan sosial menurut Noeng Muhajir, setidaknya ada 3 macam ;

[1] Penemuan teknologi baru,

[2] Wawasan baru,

[3] Perubahan struktur atau fungsi sesuatu satuan sosial.

Perubahan sesuatu mungkin berpangkal pada yang pertama, mungkin pula bermula dari yang kedua atau yang ketiga. Tetapi dikaitkan dengan dinamika pesantren maka dalam hal ini peran dan fungsi kiai menjadi sangat dominan dalam menghadapi perubahan dan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat. (Efendi, 1985: 50-51).

Peranan para kiai dan ulama sebagai tokoh masyarakat dapat dilihat, misalnya dari serangkaian upaya-upaya mereka untuk menyukseskan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Para kiai dan ulama berperan sebagai penerjemah dan komunikator yang bisa menterjemahkan ide-ide, gagasan –gagasan dan program-program pembangunan ke dalam bahasa agama yang mudah dimengerti dan kemudian mereka sampaikan kepada komunitas yang mereka pimpin. Dengan cara ini, para kiai dan ulama sekaligus berperan pula dalam memobilisasi masyarakat Muslim lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam program-program yang dilakukan pemerintah.

Fatwa-fatwa agama yang mereka keluarkan telah ikut melegitimasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, yang atas dasar itu masyarakat Muslim akan dapat menerima kebijakan dan program pembangunan yang diagendakan oleh pemerintah. Hal ini semakin mempertegas jelas peran kiai dan ulama dalam proses transformasi sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan.

Dalam alam pembangunan dewasa ini, peran pesantren pun tak dapat diabaikan dan dilihat sebelah mata. Dilihat dari perspektif transformasi sosial budaya, pesantren berperan sebagai *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of modernization* (agen pembaharuan). Hal ini dikarenakan pesantren sebagai manifestasi dari nilai-nilai ajaran Islam mengatur bukan hanya amalan-amalan peribadatan, apalagi sekedar hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga perilaku orang dalam berhubungan dengan sesama manusia dan dunianya.

Para kiai dengan menggunakan bahasa agama berperan sebagai penterjemah-*translater*- gagasan-gagasan pembaharuan dan sebagai "komunikator" ide-ide pembangunan (yang sedang dilakukan pemerintah) kepada lapisan bawah, yaitu masyarakat dan kalangan santri yang dipimpin oleh para kiai

itu. Dengan menggunakan fatwa, anjuran dan seruan yang dikemas dalam bahasa agama yang mudah dipahami oleh komunitas yang dipimpinnya, para kiai memainnkan peran secara aktif dalam menerjemahkan dan mensosialisasikan program-program pembaharuan dan pembagunan yang telah direncanakan dan dirancang oleh pemerintah. Inilah apa yang disebut sebagai faktor intern dan ekstern.

Banyak ragam contoh keberhasilan sebuah program yang digulirkan pemerintah karena keikut-sertaan, peranan kiai dan ulama. Hal ini nampak jelas pada program Keluarga Berencana (KB) dan transmigrasi yang pada awalnya mendapat tanggapan yang cukup reaksioner dari masyarakat akan tetapi lambat-laun berkat seruan, himbauan para kiai program tersebut pada akhirnya dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dalam sosialisasi dan pelaksanaan program-program kebijakan pemerintah peranan kiai dan ulama sangat strategis dalam menjembatani *gap* sosialisasi informasi program antara masyarakat dengan pemerintah. Disinilah seharusnya komitmen untuk menjadi mitra sejajar dapat diwujudkan antara pemerintah dengan para kiai/ulama, tetapi dalam perjalanan sejarah ke-Indonesian dewasa ini nyata jelas *miss-macth* antara kiai dengan pemerintah.

C. Dekonstruksi Pendidikan *Inklusifistik* Pesantren

Pada era globalisasi sekarang ini, Alvin Toffler penulis buku *The Third Wave*, membayangkan akan terciptanya "masyarakat informasi" *(the information society)* (Fajar, 1998: 200), sebagai dampak adanya abad informasi *(information age)* yang sulit dihindari oleh negara manapun, termasuk Indonesia. Sehingga fenomena globalisasi yang begitu cepat mengalami *akselerasi* dalam berbagai aspek, sebagai konsekuensi-logis dari penerapan teknologi tinggi *(high-technology)*, menyebabkan bangsa Indonesia tergiring pada pola interaksi yang amat cepat dan *massif* dengan negara-negara lain didunia. Daniel Bell, menyebutnya dengan abad masyarakat pasca- industri *(the post industrialized society)*.

Sejak dilancarkannya modernisasi pendidikan Islam dalam dunia Muslim (Majid, 2003: 33), tidak banyak lembaga pendidikan Islam yang mampu untuk bertahan seperti Pesantren. Kebanyakan lembaga-lembaga pendidikan mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan umum. Pesantren telah eksis ditengah masyarakat selama enam abad (mulai abad ke-15 hingga sekarang) dan sejak awal berdirinya, pesantren telah menawarkan pendidikan kepada mereka yang masih buta huruf. Disamping itu Pesantren juga pernah menjadi satu satunya institusi pendidikan milik masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi sangat besar dalam membentuk masyarakat melek huruf *(literacy)* dan melek budaya *(cultural literacy)*. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi masa depan tentu memiliki tujuan, kurikulum, visi dan misi dalam usaha membentuk bangsa yang lebih beradab. Adapun tujuan yang dicanangkan oleh pesantren yaitu pendidikan yang sesuai dengan norma-norma agama Islam dan selalu bersifat *tafaqquh fi'l-diin*.

Perkembangan pesantren -dari pesantren *salaf* (*bandongan* dan *sorogan*) sampai pesantren modern-*khalaf*- yang sangat pesat hingga saat ini tidaklah lepas dari adanya sistem pendidikan yang jelas dan kurikulum yang terencana dengan baik. Karena kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam keberhasilan suatu pendidikan, maka perlu adanya perencanaan dalam penerapannya, tanpa adanya kurikulum yang baik dan tepat, akan sulit untuk mencapai semua tujuan dan sasaran pendidikan yang telah dicita-citakan.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa pesantren memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan. Apalagi dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya (Qomar, 2005).

Pembangunan manusia, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat semata-mata, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen, termasuk dunia pesantren. Pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan masyarakat, kualitasnya harus terus didorong dan

dikembangkan. Proses pembangunan manusia yang dilakukan pesantren tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan manusia yang tengah diupayakan pemerintah.

Proses pengembangan dunia pesantren yang selain menjadi tanggung jawab internal pesantren, juga harus didukung oleh perhatian yang serius dari proses pembangunan pemerintah. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta pesantren dalam proses pembangunan merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Terlebih, dalam kondisi yang tengah mengalami krisis *(degradasi)* moral. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral, harus menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit moral bangsa. Sehingga, pembangunan tidak menjadi hampa melainkan lebih bernilai dan bermakna. Pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Karena sifat mandirinya itu, pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Karena itu, pesantren tidak mudah disusupi oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional harus lebih intensif berkoordinasi dan bersinkronisasi dalam pelaksanaan dan pengelolaan pesantren. Upaya merevitalisasi dan meremajakan-memodernisasi- pesantren tentunya harus sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Dilihat dari transformasi sosial budaya, sikap para kiai dan pesantren yang mereka kelola dapat dibedakan menjadi dua kelompok. ***Pertama***, para kiai yang mempertahankan nilai *ortodoksi* Islam dalam sistem pendidikan pesantren dengan car-cara melakukan usaha-usaha untuk melestarikan tradisi ulama-ulama *salaf*. Oleh karena itu, kiai ini disebut kiai *salaf* dan pesantren yang mereka pimpin disebut dengan pesantren *salafiyah*. Dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa mereka tidak menolak perlunya pembangunan atau modernisasi sarana dan prasarana fisik pesantren, prnagkat atau peralatan pendidikannya. Dengan kata lain, para kiai *salaf* tadi membuka diri terhadap modernisasi dalam rangka membangun sarana dan prasarana pendidikan dipesantren mereka. ***Kedua,*** para kiai yang sudah memasukkan ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum pesantren mereka

dengan tetap mempertahankan tradisi dan nilai-nilai ortodoksi Islam. Mereka dikategorikan sebagai kiai *khalaf* dan pesantren yang mereka pimpin dinamakan pesantren *khalafiyah* (Suyanto, 1990).Gambaran di atas mengindikasikan bahwa pesantren tidak *phobia*, tidak anti perubahan sosial, tidak anti pembaharuan, tidak anti modernisasi dan tidak ekslusif. Keaslian dan dan kesejatian unsur-unsur tradisi pesantren tetap dipertahankan sementara unsur-unsur modernisasi dapat pula diserap oleh pesantren. Dalam memberika respon terhadap arus transformasi sosial budaya yang begitu cepat, banyak pesantren (terutama yang bersentuhan dengan pengaruh peradaban modern) melakukan terobosan-terobosan, modifikasi-modifikasi terhadap sistem pendidikannya. Pesantren-pesantren tersebut telah membuka sekolah/madrasah dengan sistem klasikal sejak dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Ini pertanda fenomena penting keberadaan dan sistem pendidikan pesantren sejak perempat terakhir abad ke-20 (Ismail, 93)

Masyarakat santri merupakan salah satu kelompok yang sangat penting dalam umat Islam di Indonesia. Kepercayaan, sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat pesantren, terutama cara saling mempengaruhi masyarakat luar pesantren dan anggapan bahwa pesantren sebagai *"alternatif ideal"* (Wahid, 2001: 2-3), membuat kebudayaan pesantren agak berbeda daripada masyarakat Indonesia pada umumnya, dan juga umat Islam yang lebih luas. Oleh karena itu, menurut Abdurrahman Wahid misalnya, kebudayaan pesantren bisa dibicarakan sebagai sub-kultur. Pesantren dan masyarakat santri, dalam pemimpinan kiai, sudah membentuk Islam di Indonesia sejak zaman awal, seperti dikatakan oleh Benda, "*Memang, sejarah Islam ala Indonesia adalah sejarah memperbesarkan peradaban santri dan pengaruhnya terhadap kehidupan keagamaan, sosial dan ekonomi di Indonesia*". (Benda, 1958: 14). Pengaruh masyarakat santri terhadap masyarakat Indonesia masih kuat, baik dalam peran pesantren sebagai pusat tarekat maupun pendidikan anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya keyakinan masyarakat pesantren sebagai sarana alternatif pendidikan agama Islam yang mengajarkan nilai-nilai inklusifistik, egalitarian *(tasammuh)*, persaudaraan *(ukhuwah)*, berpikir rasional-analitik *(tawassut)* yang saat ini semakin memudar seiring banyaknya *komersialisme* dalam dunia pendidikan.

Berdasar uraian diatas membuktikan peran dan posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional memiliki tempat dan posisi yang istimewa. Karena itu, sudah sepantasnya jika kalangan pesantren terus berupaya melakukan berbagai perbaikan dan meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di pesantren. Pemerintah telah menetapkan Renstra pendidikan tahun 2005 - 2009 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu: [1] meningkatnya perluasan dan pemerataan pendidikan, [2] meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan; dan [3] meningkatnya tata kepemerintahan *(governance)*, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Maka, dunia pesantren harus bisa merespon dan berpartisipasi aktif dalam mencapai kebijakan di bidang pendidikan tersebut. Pesantren tidak perlu merasa minder, kerdil, kolot atau terbelakang. Karena posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dengan lembaga pendidikan formal lainnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

D. Menggugat *Supersesionisme* Pesantren: Antara Jihad dan Terorisme

Psikolog Gordon W. Allport, menyatakan pendapatnya bahwa untuk membuktikan orang-orang yang beragama lebih sehat mentalnya daripada orang-orang yang tidak beragama, untuk bisa menyatakan demikian menurut beliau maka perlu terlebih dahulu mendefinisikan apa arti beragama. Menurut Allport ada batasan dua macam definisi beragama : [1] ekstrinsik dan [2] intrinsik. (Rahmat, 2004 :26).

Akhir-akhir ini dunia pesantren sering dianggap salah satu unsur penting dalam sebuah organisasi atau jaringan yang beraliran garis keras, misalnya, sebagai pusat mengajar dan mendukung teroris serta tempat yang cocok untuk menggelapkan –*kamuflase*- kegiatannya. Hal ini sering dibicarakan dalam media massa baik di Indonesia maupun luar Indonesia sejak ditemukannya jaringan Jemaah Islamiyah berdasarkan pada hubungan dengan beberapa anggota keluarga dan kelompok alumni pesantren tertentu. Ini didasarkan pada bukti-bukti bahwa beberapa alumni pesantren yang melakukan kegiatan kriminal misalnya menolong teroris atau membuat dan meledakkan bom. Menurut media massa, pesantren

yang mereka hadiri dianggap sebagai pesantren keras dan juga dianggap penting dalam jaringan teroris, sampai pesantren sebagai institusi yang dianggap bersalah. Setelah pesantren dibicarakan dalam hubungannya dengan masalah teroris dalam pers Indonesia dan internasional, sepertinya semua pesantren dan santri di Indonesia diwarnai dengan stigma teroris. Di surat kabar Indonesia pembaca sering menemukan artikel yang membela pesantren, santri, dan pendidikan beragama Islam di Indonesia di mana eksistensi pesantren –pada umumnya- sering 'dikambinghitamkan' (Jemaah Islamiyah, 63). sebagai pusat/sarang teroris.

Dalam literatur *fiqh* sebagai mata ajar utama di pesantren, kita memang menjumpai ada bab tentang Jihad. Namun maknanya lebih kepada, ***pertama***: memerangi mereka yang memerangi kaum Muslimin yang dalam kondisi ini wajib membela diri dengan cara apapun, asalkan dilakukan dalam medan laga (*ma'rakah*). Makanya sebagian ulama Timur Tengah mengeluarkan fatwa yang membenarkan serangan bunuh diri (*suicide)* pemuda-pemuda palestina terhadap zionis Israel di tanah pendudukan Israel dengan cara melilitkan bom di tubuhnya. Karena di sana adalah *ma'rakah* itu sendiri dan pelakunya dihukum mati syahid.Tindakan ini dilakukan karena tidak ada cara lain untuk menandingi kecanggihan peralatan militer Israel dan memang terbukti ampuh membuat mereka panik dan gentar. Agaknya fatwa ini merujuk kepada cerita serangan bunuh diri yang dilakukan seorang sahabat Rasulullah SAW dalam satu peperangan. Dia bertanya: *"Ya Rasulullah baju besiku ini menghambatku untuk mati syahid, bolehkah aku membukanya dan 'terjun bebas' di medan laga tanpa pengaman sedikitpun seperti orang mau bunuh diri. "Boleh",* jawab Rasulullah SAW. ***Kedua,*** agresi terhadap kekuatan yang berpotensi menyerang umat Islam, seperti ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ke Kerajaan Persi dan Romawi, dalam kondisi ini, apa yang dikenal dengan *pre-emptive strike* (menyerang duluan), dapat dibenarkan. Serangan model ini dimaksudkan untuk melemahkan dan menghancurkan kekuatan militer musuh yang memang mereka persiapkan untuk menghancurkan kaum Muslimin. ***Ketiga***, jihad juga berarti perjuangan melawan hawa nafsu, kebodohan, ketidak-adilan, penindasan, korupsi dan lain-lain. Jenis ketiga ini lebih populer didengung-

dengungkan di era modern sekarang ini dan seringkali dijadikan sebagai, memakai istilah ilmu *lughah, ghalbah tahqiqiyah* (mendominankan pengertian sesuatu untuk mengeliminir yang lain). Hal ini bukan tanpa alasan, bukankah ketika Rasulullah SAW kembali dari satu peperangan dahsyat beliau justru bersabda: *"kita kembali dari jihad kecil kepada jihad besar."* Bahkan, sebagaimana pengakuan Jhon L. Esposito, seorang sarjana Barat yang lumayan objektif dalam menilai Islam, dalam bukunya *What everyone needs to know abaut Islam* (2002), Islam tidak pernah mendukung dan melegitimasi kekerasan. Hampir semua surat dalam al-Quran secara konsisten dimulai dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang juga diperuntukkan untuk memulai segala aktifitas keseharian seorang Muslim. Jikapun ada ayat-ayat tentang perang dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat at-Taubah yang merupakan satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan *bismillahirrahmanirrahim*, harus dibaca dengan pendekatan sosial dan politik ketika ayat itu diturunkan. Jazirah Arab, dimana Islam muncul, dipenuhi oleh kabilah-kabilah yang haus perang dan terletak di wilayah Timur Jauh yang diapit oleh dua imperium besar dunia kala itu, Byzantium (Romawi Timur) dan Sasanid (Persia). Kedua faktor ini sudah lebih dari cukup untuk menamakan ayat-ayat tersebut sebagai 'ayat-ayat bela diri' daripada 'ayat-ayat pedang' (*sword verses)*, sebagaimana klaim sebagian orientalis Barat.

Kembali ke masalah pesantren, secara umum ada tiga karakteristik yang mengitari dunia pesantren yakni; ***pertama***: pesantren yang lebih fokus dalam mengajarkan nilai-nilai lama (tradisional) yang sebagian besarnya masih tetap *up to-date* untuk diwujudkan realisasinya di era globalisasi ini. *Trend* pesantren ini lebih mementingkan *tafaqquh fiddiin* (pendalaman agama) dalam bidang *fiqh*, tauhid, tasawuf sebagai ilmu *fardhu 'ain* dan ilmu-ilmu kebahasaan lainnya seperti *nahwu, sharaf, mantiq, bayan* dan lain-lain sebagai ilmu *fardhu kifayah.* Kitab-kitab yang digunakan adalah kitab-kitab klasik yang berumur ratusan bahkan ribuan tahun. Di sini, walaupun sebagiannya telah mengadopsi pendidikan sekolah untuk mendapatkan ijazah formal untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi atau mencari kerja *duniawiyah*. Tapi semua santri benar-benar dalam doktrin *lillaahi ta'aala* dan 'kerja' *ukhrawiyah*. Tipikal ini biasanya lebih toleran,

inklusif dan terbuka dalam menjaga harmonisasi sosial dengan siapapun, yang berbeda agama sekalipun dan hampir dipastikan 'bebas asap dan abu terorisme'. Secara kuantitatif dan faktual jenis ini adalah mayoritas dan tersebar di seluruh penjuru tanah air seperti *dayah-dayah* tradisional di Aceh. ***Kedua***, pesantren terpadu; sekolah dan mengaji. Di sini kitab-kitab lama memang agak kurang dikaji dan menggantikannya dengan kitab-kitab era baru dalam pelbagai disiplin ilmu yang di antaranya ada sinkronisasi dengan resolusi lama dan ada pula yang tidak, terutama dalam bidang *fiqh* dan tafsir. Walaupun fenomena ini sedikit mereduksi nilai-nilai asli kepesantrenan, namun tetap sebagaimana jenis pertama di atas, tipe ini juga *nothing to do with terrorism.* ***Ketiga***, pesantren-pesantren yang *ambiguous,* tidak jelas nilai. Satu sisi mereka menamakan lembaganya 'pondok pesantren' atau *ma'had*, akan tetapi kitab-kitab klasik yang menjadi ruh pesantren selama puluhan malah ratusan tahun tersebut sama sekali tidak diajarkan. Bahkan, khazanah Islam yang tidak ternilai harganya itu dianggap *kolot* dan ketinggalan zaman. Di sisi lain, mereka kerap kali mengajarkan buku-buku baru yang rentan dengan ideologi politik Timur Tengah, seperti Wahabisme, Ikhwanul Muslimin dan lain-lain. Perlu ditambahkan di sini, sebagai contoh gerakan Ikhwanul Muslimin walaupun memberi beberapa catatan kepada konsep-konsep perjuangan mereka yang terkadang kurang realistis seperti seluruh dunia harus di bawah satu khilafah, masalah *bai'at* dan lain-lain. Gerakan ini banyak didominasi kaum muda yang bersemangat tinggi namun terkadang lebih berupa impian daripada kenyataan. Bukankah Nabi SAW bersabda bahwa akhir zaman nanti akan datang pemuda-pemuda yang *'hudatsaatul asnaan 'sufahaa-ul ahlaam'* (gigi baru tumbuh namun mimpi terlalu muluk-muluk).

Sedangkan gerakan Wahabisme, mereka terlalu kaku memahami ayat dan hadits sehingga sering mem*bid'ah*kan ulama-ulama besar baik dalam dunia *fiqh* maupun sufi. Bahkan, seperti dalam tulisan Jane P. Sasson dalam bukunya *The Princess,* 1992 dan Qadi Kalyakut, 2005, catatan hitam penyerangan Kota Mekkah dan Madinah (1802-1806) yang dilakukan putra-putra Saud dan al-Wahab. Penyerangan ini mengakibatkan terbunuhnya banyak *innocent people* dan ulama-ulama yang tidak sepaham dengan mereka Ini akan terus membayangi-

bayangi dengan dalih misi ‘pengembalian Islam ke warna aslinya’ yang mereka selalu dengung-dengungkan walaupun pada kenyataannya lebih mendekati dewan inkuisisi yang pernah membantai umat muslimin di Andalusia. Misi ini terkadang ‘mengerikan’ sekali seperti fatwa mereka di dalam kitab *Tarikhul Mamlakah As-saudiyyah li Shalahuddin Al-mukhtar [Alwahabi*] cetakan Beirut, juz 2, Halaman 344, bahwa: *“Barangsiapa yang bertawassul di pusara Nabi dan menjadikannya sebagai perantara menuju Allah Swt maka dia adalah kafir dan dia harus bertaubat tiga kali dan jika tidak maka ganjaran yang pasti buat dia adalah dibunuh* (Qadi, 2005: 344). Ini salah satu contoh dari sekian banyak tamsilan lain dari faham pembid’ahan dan pengkafiran. Dan ini sangat berbahaya karena dapat membentuk kepribadian yang keras dan intoleransi kepada komunitas lain yang akan berujung pada radikalisme agama. Seharusnya pesantren sepatutnya ‘diharamkan’ menganut ini, namun fakta dan data membuktikan bahwa di lingkungan seperti inilah pelaku-pelaku teror tersebut bermain *seek and hide* (petak umpet) sambil menguatkan jaringan (sel-sel terorisme) selama ini. Mereka, walaupun tidak semua, adalah pelaku-pelaku pemboman di tanah air yang *nota bene*-nya adalah alumni-alumni pesantren model ini.

Sungguhpun demikian, dengan mengatakan ini tidaklah serta merta menuduh bahwa pesantren dengan tipologi ini adalah produsen-produsen teroris di Indonesia. Kesemuanya semata mengungkapkan fakta yang ada untuk jadi perhatian serius para kiai dan ustadz pengasuhnya untuk lebih mawas diri dan berhati-hati sekaligus melakukan pembenahan dari dalam jika diperlukan. Akhirnya kita sependapat untuk menolak tuduhan yang selalu mengaitkan aksi terorisme dengan pesantren. Hal ini pernah dibantah sendiri oleh mantan komandan jaringan Jamaah Islamiyah (JI), Nasir Abbas, dalam sebuah diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta (27/2/2010). Dia mempertegas bahwa aksi terorisme tidak disebarkan melalui pesantren, terorisme terjadi karena ideologi yang salah yang tidak ditemukan dalam kurikulum pesantren. Sungguhpun begitu ‘pembajakan’ nilai-nilai kurikulum pesantren jenis ketiga di atas ke arah terorisme lebih mudah dan potensial.

Maka adalah suatu yang naif ketika mencuat kasus terorisme di Indonesia dengan serta merta kita menuding pesantren sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab atas hal tersebut. Kalaulah hanya paradigma berpikir yang sesempit itu maka persoalan teroris diIndonesia tidak akan pernah jelas penyelesaiannya, dan cara mengamankan beberapa tokoh-tokoh ulama tidak akan menyelesaikan akar pokok permasalahan. Maka diperlukan kemitraan dan tentunya komitmen untuk bisa melihat secara jernih permasalahan terorisme di Indonesia serta keterkaitan pesantren secara obyektif. Sudah saatnya pemerintah dan unsur-unsurnya bergandengan erat dan merangkul lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai upaya untuk menjernihkan pemahaman masyarakat tentang stigma pesantren yang lekat dengan terorisme.

Terorisme tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang adanya semangat jihad dalam ajaran Islam dan adanya literatur-literatur syariat Islam yang diterjemahkan secara tekstual saja, akan tetapi juga hendaknya dilihat dari sudut pandang yang lain, bisa jadi akumulasi kekecewaan terhadap pengelolaan negeri ini menjadi pemicu bagi orang-orang untuk menjadikan lahan perang suci melawan ketidak-adilan, bisa jadi adanya kesenjangan sosial, tingginya angka – kriminalitas- korupsi, mahalnya biaya pendidikan sebagai dampak komersialisme dunia pendidikan sehingga akses pendidikan bagi rakyat miskin hanyalah sebatas angan-angan dan kelangkaan kesetaraan hak dan kewajiban hukum sebagian warga negara Indonesia, bisa jadi pemicu (*triger)* bom waktu dari aksi tindakan terorisme.

E. Pesantren dan Spirit Kebangkitan Intelektual

Albert Einstein dalam bukunya, Out of My Later Years, menyatakan bahwa :

"Now, even though the realslms of religion and science in themselves are clearly marked off from each other, nevertheless there exist between the two strong resiprocal relationships and dependencies. Though religion science, in the broadest sense, what means will contribute to the attainment of goals it has set up. But science can only be createdby those who are thoroughly imbued with the

aspiration toward truth and understanding. This source of feeling however, springs from the sphere of religion. To this there also belongs the faith in the possibility that the regulation valid for the world of existence are rational, that is, comprehensible to reason. I cannot conceive of a genuine scientist without that profound faith. The situation may be expressed by an image : Science without religion is lame, religion without science is blind." (Widjaja, 1983: 53). Dari ungkapan diatas nyata bahwa ilmu tidak semata-mata untuk tahu *an sich* , untuk memuaskan keinginan akan pengetahuan. Ilmu dituntut guna keselamatan dan perbaikan –kualitas- hidup manusia di atas dunia ini. Sebagai anggota masyarakat orang-ilmu bertanggungjawab , sekurang-kurangnya merasai tanggungjawabnya, tentang baik dan buruk keadaan masyarakat.

Islam sebagai agama, ia tak dapat langsung memberi isi kepada ilmu, akan tetapi sumbangan Islam kepada ilmu terdapat pada anjuran-anjurannya, kewajiban bagi para penganutnya untuk mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya dimana saja, dari siapa saja. Umat Islam diharuskan menuntut kemuliaan hidup dan pengetahuan. Itulah sebabnya maka diharuskan untuk menuntut ilmu, tentang agama, tempat orang menuntut ilmu tidak menjadi soal, yang diperhatikan hanya hikmah dan kepandaiannya. Nabi Muhammad SAW bersabda :

"Al-hikmatu dhaal-latul mukmini fahaisu wajadaha fahua ahaqqu biha", (hikmat itu barang mukminin, dimana saja ia dapati, ialah yang paling patut menjemputnya).

Pesantren sebagai salah satu unsur lembaga pendidikan di Indonesia, sangat erat secara historis dengan perkembangan kebangsaan Indonesia dan juga erat hubungannya dengan sejarah pemikiran-pemikiran keagamaan –khususnya Islam- di Indonesia. Pesantren yang pada awal perkembangannya masih bercorak *salaf* (tradisional), lambat-laun mulai *bermetamorfosis* menjadi lembaga-lembaga pendidikan modern menggunakan studi komparatif dengan mengombinasikan antara keilmuan agama dengan keilmuan umum, yaitu perpaduan antara ilmu –ilmu keislaman *(Islamic sciences)* dengan ilmu-ilmu umum *(modern sciences)* dinamakan dengan pendekatan *integrative-interkonektif*.

Dalam kelembagaan Islam yang *diversifikatif* nampak jelas adanya dua tekanan pendidikan yang berbeda antara usaha mengembangkan watak kesalehan individual dan usaha intelektualisasi keislaman. Biasanya usaha yang pertama tercermin pada proses pendidikan agama di sekolah dan madrasah tingkat dasar dan menegah. Menanamkan watak kesalehan lebih ditekankan kepada anak didik dikedua lembaga tersebut karena adanya orientasi pencapaian keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini kemudian direspon oleh sejumlah sekolah yang mengusahakan penciptaan suasana keberagamaan dalam lingkungan pergaulan anak didiknya. Dengan demikian dalam kenyataan yang diversifikasi pun masih ada titik temu orientasi antar lembaga pendidikan dalam bidang yang universal.

Adapun usaha intelektualisasi keislaman dapat dicermati pada level perguruan tinggi. Pada level ini nampak adanya kecenderungan pendidikan Islam yang ditekankan pada aspek upaya pengkajian dan pemahaman Islam yang dinamis dengan tanpa meninggalkan kajian analisa historis-kritis terhadap pemikiran Islam yang telah berkembang dari abad ke abad. Proses ini berpengaruh pada cara pandang keduniaan umat Islam yang lebih luas karena mereka dapat membebaskan diri dari pemahaman-pemahaman keagamaan yang sempit dan doktrinal. Tidak heran jika dalam kenyataannya, perkembangan Islam di Indonesia sangat mudah merespons kecenderungan-kecenderungan kontemporer yang lebih positif bagi kemajuan peradaban umat manusia, seperti halnya isu-isu demokratisasi, hak-hak manusia, diskursus masyarakat madani *(civil society)*, keadilan dan kesetaraan gender. Nurcholish Madjid memberikan deskripsi tentang *starting-point* perkembangan intelektual Muslim yang dibangun sejak tahun 1970an dan diperkirakan pada tahun 2006 akan mulai gelombangn kebangkitan intelektual muslim kedua yang dipelopori oleh Muslim tradisional.

Para pakar berpendapat , bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa dan masyarakat dapat dilihat dari bobot kualitas pendidikan yang diselenggarakan bangsa dan masyarakat tadi. Sedangkan taraf analisa intelektual suatu bangsa dapat diamati dari mutu pendidikan bangsa tersebut. Kecanggihan ilmu dan teknologi suatu bangsa dapat

diukur dari mutu dan kualitas pendidikan bangsa yang bersangkutan, ini menunjukkan korelasi yang signifikan antara mutu pendidikan suatu bangsa dengan kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki.

Begitupun halnya dengan umat Islam khususnya di kalangan muslim tradisionalis, apabila kualitas pendidikan di kalangan muda muslim –baca komunitas santri pesantren- peningkatan dan pemekaran SDM akan mengalami peningkatan dan percepatan apabila terjadi pula pada mereka (Kompas 30/12/1996). Sehingga apada akhirnya mempercepat proses gelombang kebangkitan intelektual dikalangan pesantren sebagai pelopor dan penggerak kebangkitan intelektual muslim kedua di Indonesia sebagaimana yang disitir oleh Nurcholish Madjid diatas. Sebagai penutup dari diskursus tentang pengembangan pendidikan pesantren ini dengan sebuah uraian dari pujangga India, M. Iqbal, ia mengatakan :

"Islam is neither nationalism nor imperialism but league of nations, which recognized artificial boundaries and racial distinctions for facility of reference only, and not for restricting the social horizon of its members" (Dr. M. Aziz Ahmad, Iqbal as Thinker, p. 267). Orang Islam melakukan ntiap-tiap perbuatan karena Allah SWT. Demikian juga hendaknya dalam diri seorang muslim ditanamkan semangar *mardhatillah* dalam menuntut ilmu. Ilmu menuntut pengorbanan dalam diri kita *(self-sacrifice)*, karena hnya dengan pengorbanan tersebut ilmu mencapai kemajuan.

Wallahu a'lam bishowwab

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang secara historis merupakan lembaga tertua dalam bidang pendidikan keagamaan di Indonesia. Adaptasi pengajaran pesantren dalam beberapa kajian kesejarahan berasal dari tradisi pengajaran agama Hindu yang ditransformasikan dalam kultur dan budaya Islam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai kultur budaya yang kuat dalam menjaga nilai-nilai tradisi lama yang berkembang dimasyarakat, inilah mengapa pesantren mampu bertahan *(struggle)* dan berkembang di masyarakat.
2. Selama ini pesantren juga sering diidentikkan dengan hal-hal yang berbau kejumudan berpikir, eksklusif, puritan dan lain sebagainya. Faktanya dalam sejarah kebangkitan intelektual Islam tercatat sumbangsih besar hasil pendidikan *tradisionalisme* pesantren. Ini membuktikan bahwa pesantren baik yang bercorak salaf, khalaf dan semi modern sekalipun selalu mempunyai karakteristik yang khas untuk selalu *up-date* mengikuti perkembangan zaman.
3. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren mempunyai daya *resistensi* terhadap perkembangan zaman. Hal ini terbukti lembaga pesantren hingga kini masih tetap eksis, yang tak mungkin dipisahkan dari *eksistensi* (keberadaan) pesantren karena adanya daya kharismatik kiai yang memimpin pesantren. Dalam kultur budaya ke-Indonesiaan masyarakat Indonesia yang pada umumnya bersifat *paternalistik* sangat menghargai sosok atau figur pelindung, pengayom, pengasuh yang mampu memberikan solusi-solusi –bahkan yang alternatif

sekalipun- atas permasalahan yang ada di masyarakat. Sosok atau figur ini terepresentasikan dengan ideal pada sosok kiai yang selama ini mereka yakini juga mempunyai kapasitas kearifan keilmuan agama.

4. Kiai sebagai unsur penting dalam pesantren memberikan warna, corak dan faham sebuah pesantren. Pada proses sejarah pembangunan bangsa Indonesia, peran pesantren –baca kiai- turut mewarnai corak perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, disisi yang lain kiai juga turut mewarnai corak pemikiran santri-santrinya. Peran serta kiai sangat urgen untuk turut mendampingi pemerintah dalam mensukseskan sosialisasi dan pengawasan program-program kebijakan pemerintah, jadi disatu sisi kiai mempunyai daya *reverse* terhadap pemerintah.
5. Pendidikan pesantren hingga kini berkembang menjadi lembaga pendidikan yang patut diperhitungkan dikancah dunia pendidikan di Indonesia. Banyak sudah para lulusan pesantren yang mampu berkiprah dan membangun Indonesia. Pendidikan pesantren yang selama ini dikenal dengan pengajaran sistem lama telah berkembang dalam sistem pengajarannya, karena dalam hal ini pesantren dituntut harus mampu bersaing dan berkompetisi dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Maka dalam perkembangan pesantren *salaf* kita sudah bisa menjumpai kombinasi dan *up-grade* dari sebuah bangunan sistem pengajaran yang menggabungkan berbagai disiplin keilmuan, tidak hanya berkonsentrasi pada satu fokus aspek sistem pengajaran saja.
6. Pesantren dalam membangun citranya sebagai pusat peradaban Islam tidak serta dengan mudah dapat tercapai apabila masing-masing unsur yang ada di pesantren sebagai unsur intrinsik dan masyarakat serta pemerintah sebagai unsur ekstrinsik berjalan sendiri-sendiri. Jika memang *idealita* umat untuk membangun pusat peradaban Islam maka diperlukan komitmen, *ghirah*, konsistensi serta sikap terbuka dari masing-masing pihak dalam memberikan alternative-pemikiran demi kemajuan pesantren. Sehingga nantinya pesantren bisa dijadikan model atau laboratorium pelatihan bagi calon intelektual-agamawan.

7. Perhatian dan minat pemerintah untuk membangun citra dan pendidikan dunia pesantren sudah seharusnya dilakukan karena hal ini dinamika peradabadan ke-Indonesiaan tidak bisa dilepaskan dari partisipasi dan peran serta para intelektual-agamawan yang datang dari pesantren-pesantren tradisionalis. wujud dari kepedulian pemerintah terhadap salah satu unsur pendukung pembangun peradaban keilmuan Islam di Indonesia dengan memberikan ruang-ruang bimbingan dan juga dana *stimulan* bagi perkembangan .pesantren kelak.

B. Saran

1. Pesantren hendaknya terus berbenah diri dalam mensikapi perkembangan zaman, terutama dalam sistem pengajarannya. Hal terpenting nilai-nilai khas yang menjadi kekuatan pesantren tidak hilang begitu saja seiring dengan transformasi pesantren menjadi lembaga pendidikan yang berbasis pada profesionalitas pelayanan.
2. Pesantren sebagai basis peradaban keilmuan dan peradaban Islam hendaknya senantiasa berpegang teguh pada nilai tradisi kearifan lokal, hal ini terbukti bahwa pesantren dengan dinamikanya mampu bertahan dan – bahkan berkembang- karena adanya karaterstik yang khas pada dunia pesantren dan ini didukung oleh masyarakat, yang cenderung masih berada pada masyarakat pedesaan dalam taraf perkembangan.
3. Wacana pesantren sebagai pusat peradaban Islam hendaknya diimbangi dengan komitmen berbagai pihak termasuk dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kebijakan untuk senantiasa bekerjasama dengan unsur – unsur yang terkait dengan dunia pesantren. Pesantren dan Pemerintah serta pihak-pihak swasta hendaknya bersama-sama menggagas solusi bagi problematika masyarakat dan peradaban yang berkembang di masyarakat terutama dengan fokus pada perkembangan sistem pendidikan di pesantren sehingga kedepan pesantren bisa menjadi alternatif lembaga pendidikan yang patut diperhitungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Wahid, "Kata Pengantar". Dalam Hiroko Horikoshi. ***Kyai dan Perubahan Sosial***, Jakarta : P3M, 1987

Abdurrahman Wahid, ***Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantre****n*, Yogyakarta: LKiS, 2001

Ainur Rofieq, ***Profil Umum Beberapa Aspek Pendidikan Formal yang diselenggarakan Pesantren se-Karesidenan Malang*** , dalam ***Mendongkrak Mutu Pendidikan***, Malang: FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, 2004

Arifin Imron, ***Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng***, Malang: Kalimasahada Press, 1993

A. Sunyoto, ***Ajaran Tasauf dan Pembinaan Sikap Hidup Santri: Studi Kasus Pesantren Nurul Haq Surabaya*** (Tesis M. A., PPS IKIP, 1990)

Bakhtiar Effendi, ***"Nilai Kaum Santri"*** **dalam Dawam Rahardjo,** ***" Pergulatan Dunia Pesantren"***, Jakarta: P3M, 1985

Clifford Geertz, ***"The Javanese Kyai: The Changing Role of a Cultural Broker*****", dalam** ***Comparative Studies in Society and History***, Vol. 2 No. 2 , Januari, 1960

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, cet. 2, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989

Departemen Agama RI, ***Al- Qur'an dan Terjemahannya*** , Jakarta: PT Intermasa, 1974)

Drs. Abdullah Idi, M. Ed, ***Pembangunan Kurikulum, Teori dan Praktek,*** Cet. I, Jakarta: Gaya Media, 1999

Dr. Nur Syam, ***Islam Pesisir***, Yogyakarta: Penerbit LKIS, 2005

Dr. Husni Rahim, ***Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia***, Jakarta: Logos Wacana, 2001

H. A. Mukti Ali, ***Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia***, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1971

H. A. Malik Fajar, ***Visi Pembaharuan Pendidikan Islam***, cet. 1, Jakarta : LP3NI, 1998

Harry J. Benda, ***The Crescent and the Rising Sun***, The Hague and Bandung: van Houve, 1958

Hiroko Horikoshi, ***Kiai dan Perubahan Sosial***, terj. Umar Basalim dan Andy Muarly Sunrawa, Jakarta: P3M, 1986

http: //www. republika. co. id/kolom. asp? kat. id =16

http://www.scribd.com/doc/11711549/Makalah-Pesantren-Dalam-Sistem-Pendidikan-Nasional

http: //www. republika. co. id/kolom. asp? kat. id =16

http://www. gatra.com/2009-09-21/artikel. php/ id=130376

http: //www.waspadamedan.com

I. Wangsa Widjaja; Meutia F. Swasono (penyusun), ***Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato II: dari tahun 1951 s.d. 1979*** , Jakarta : PT. Inti Idayu Press, 1983

Indonesia Backgrounder: ***How The Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates***, ICG Asia Report No. 43, 11 December 2002

Jalaluddin Rakhmat, ***Islam alternatif : Ceramah-ceramah di Kampus***, Jakarta : PT. Mizan Pustaka, 2004

Jalaluddin Rahmat, Prof. Dr. Nurcholish Majid, ***Jejak Pemikiran Dari Pembaharu Sampai Guru,*** Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Jemaah Islamiyah in South East Asia: ***Damaged but Still Dangerous***, ICG Asia Report NO. 63, 26

Julia Day Howell, ***Sufism and the Indonesian Islamic Revival***, di The Journal of Asian Studies, Vol., 2001

Martin Van Bruinessen, ***Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia,*** Bandung: Mizan, 1995

Mastuhu, ***Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren ; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Pendidikan Pesantren***, Jakarta: INIS, 1994

Nurcholish Madjid, *"**Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Islam***", dalam Dawam Rahardjo, ed., ***Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah***, Jakarta : P3M, 1985

Noeng Muhajir, ***Teori Perubahan Sosial***, Yogyakarta: Rake Sarasih, 1984

Prof. Dr. Faisal Ismail, M. A., ***Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Analisa Historis,*** cet. Ke-4, Jakarta : PT. Mitra Cendekia, 2004

Prof. Dr. Ridlwan Nasir, M. A., ***Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren ditengah Arus Peradaban***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Prof. Dr. Mukti Ali, ***Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini***, cet. 1, Jakarta : CV. Rajawali, 1987

Prof. Dr. Mujamil Qomar, M. Ag, ***Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Isntitusi***, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005

Qadi Kalyakut, ***Tarikhul Mamlakah As-saudiyyah li Shalahuddin Al-mukhtar***, Juz. 2, Beirut: Alwahabi, 2005

Tim CTSD UIN Sunan Kalijaga, ***Sukses di Perguruan Tinggi: Modul Sosialisasi Pembelajaran bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga,*** Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005

Soeganda Poerbakawatja, ***Ensiklopedia Pendidikan***, Jakarta: Gunung Agung, 1978

UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Zamakhasyari Dhofier, ***Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kyai***, Jakarta: LP3ES, 1994